

TERIMA BANTUAN DARI KOMISI VIII DPR RI

Sampai 29 Februari, Sleman Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman menerima bantuan logistik dan peralatan untuk siaga darurat bencana hidrometeorologi yang diserahkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Senin (29/1). Bantuan yang diserahkan berupa 200 paket sembako, 200 buah selimut, dan 200 buah terpal.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa usai menerima bantuan menyampaikan kondisi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Sleman menjadi perhatian Pemkab Sleman. Untuk itu, status ini kemudian ditindaklanjuti melalui SK Bupati Sleman Nomor 67.5 Tahun 2023, tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Sleman.

"Penetapan SK ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman ben-

cana seperti kekeringan, banjir, angin kencang, tanah longsor, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan mulai 1 Desember 2023 hingga 29 Februari 2024 mendatang," jelasnya.

Danang juga menyampaikan keprihatinan atas bencana puting beliung yang terjadi pada Jumat (26/1) lalu di kawasan Kapanewon Berbah, Prambanan, dan Kalasan. Dari peristiwa tersebut diperkirakan taksiran kerugian korban bencana mencapai lebih dari

Rp 373 juta akibat rumah rusak ringan dan rumah rusak berat.

"Untuk menanggulangi bencana ini, kami telah melakukan sejumlah langkah. Seperti asesmen dampak bencana, pemotongan pohon yang menutup akses jalan yang membahayakan pengguna jalan, hingga menyalurkan bantuan kedaruratan," jelas Danang.

Sementara Deputy Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyebut salah satu upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan memperkuat pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini dapat menjadi langkah untuk memini-

malisir timbulnya korban lebih banyak. "Masyarakat perlu diperkuat dengan berbagai cara, mulai dari simulasi, pelatihan dan pemahaman dalam mengantisipasi bencana," katanya.

Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI MY Esti Wijayanti mengatakan, penanggulangan bencana tak hanya menjadi perhatian pemerintah, namun juga bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tindakan antisipasi bencana ini perlu dilakukan secara serius.

Esti juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Pemkab Sleman dan BNPB dalam menyalurkan bantuan Siaga



Anggota Komisi VIII DPR RI MY Esti Wijayati menyerahkan secara simbolis bantuan yang diterima Wabup Danang Maharsa.

Darurat Bencana Hidrometeorologi ini. "Kita harus serius dalam aksi

kemanusiaan ini. Mari kita hadapi bersama dan tidak perlu ragu untuk

mendiskusikan berbagai kendala yang kita hadapi," jelasnya. (Has)-f

DIGELAR 'PESTA RAKYAT NDEREKKE PAK HARDO'

Hari Ini, Sekda Sleman Purna Tugas

SEKDA Sleman Harda Kiswaya, Rabu (31/1) hari ini mengakhiri masa tugasnya sebagai ASN di Pemkab Sleman. Mulai 1 Februari besok, Harda Kiswaya resmi menjalani purna tugas dalam pengabdian sebagai birokrat di Pemkab Sleman.

Assekda Sleman Kunto Riyadi menuturkan, lebih dari 30 tahun, Harda Kiswaya mengabdikan sebagai ASN di Sleman. Pada tanggal 31 Januari ini, dilaksanakan pelepasan purna tugas oleh berbagai elemen baik secara kedinasan maupun nonkedinasan. Pelepasan purna tugas Harda Kiswaya ini cukup meriah karena diantar oleh iring-iringan komunitas Jeep dari lereng Merapi yang ber-



Sekda Sleman Harda Kiswaya.

jumlah 100 mobil. "Seluruh masyarakat dari 17 kapanewon juga mengirimi gunungan yang berisi hasil bumi di setiap kapanewon. Gunungan

hasil bumi ini merupakan bentuk penghormatan kepada Harda Kiswaya yang telah memberikan pemikiran dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sleman. Gunungan ini juga nanti diperebutkan oleh masyarakat yang memiliki simbol bahwa setelah purna, Harda Kiswaya masih ingin mengabdikan dan bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Kunto didampingi panitia Abu Bakar.

Ditambahkan Abu Bakar, ada 57 komunitas juga mengantarkan Harda Kiswaya Kembali ke kediamannya di Godean. Komunitas-komunitas tersebut terdiri dari berbagai kelompok profesi seperti petani, penggiat ke-

senian, penggiat pariwisata, relawan SAR, komunitas RAPI, komunitas kawala alit, paguyuban perangkat kalurahan, paguyuban Lurah dan masih banyak komunitas-komunitas yang lainnya. Setidaknya ada 2.000 lebih peserta yang mengikuti kegiatan ini.

"Kegiatan di seputaran rumah Harda Kiswaya di Kowanan Godean juga tak kalah meriah. Disediakan berbagai macam makanan yang dapat dinikmati oleh para peserta seperti angkringan, soto, sate dan juga berbagai macam pentas kesenian juga dilaksanakan dalam memeriahkan kegiatan di purna tugas di kediamannya," kata Abu.

(Has)-f

Bupati Lantik 559 Pejabat Sleman

SLEMAN (KR) - Sebanyak 559 pejabat di lingkup Pemkab Sleman dilantik Bupati Sleman Kustini di Pendapa Parasama Setda Sleman, Selasa (30/1). Mereka yang dilantik merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas.

Menurut Bupati, pelantikan ini merupakan upaya Pemkab Sleman untuk terus meningkatkan efektivitas organisasi. Rotasi dan promosi hendaknya disikapi sebagai sebuah dinamika perkembangan organisasi, dan sebagai rangkaian perubahan menuju organisasi yang lebih baik. "Regenerasi kepemimpinan



Bupati Kustini, Wabup Danag Maharsa dan jajaran Forkopimda bersama para pejabat terlantik.

pinan dan proses kaderisasi inilah yang menentukan keberlangsungan jalannya roda birokrasi pemerintahan. Diharapkan roda birokrasi akan berjalan semakin baik ke depannya," ujarnya.

Bupati juga mendorong setiap pejabat terlantik untuk menjadi inovator sekaligus navigator pelaksanaan program dan kegiatan yang tangguh, smart, bertanggung jawab dan profesional pada

posisinya masing-masing. "Saya juga berpesan kepada seluruh pejabat terlantik untuk tetap konsisten menjaga integritas," kata Bupati. (Has)-f

KOLABORASI OJK DAN BPS

Survei Nasional Literasi dan Inklusi 2024



Petugas melakukan survei kepada warga di Cupuwatu II Purwomartani Kalasan Sleman.

SLEMAN (KR) - Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Di Kabupaten Sleman, sampling dilakukan warga di Cupuwatu II Purwomartani Kalasan, Selasa (30/1).

Sejumlah pertanyaan disampaikan petugas kepada warga, seperti pengetahuan tentang lembaga per-

bankan, sejauh apa pemanfaatannya sampai ke pinjaman online. Ada 10.800 responden yang menjadi sasaran survei atau sampel SNLIK. Di DIY, kegiatan hanya dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo dan Sleman, masing-masing sebanyak 90 rumah tangga.

"SNLIK bertujuan mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, hasil SNLIK nantinya akan digunakan

sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan program-program pemerintah terkait literasi dan inklusi keuangan," kata Plt Kepala BPS Pusat Amalia Adininggar Widyasanti.

Proses pemutakhiran telah berlangsung 9-16 Januari 2024. Dilanjutkan pendataan mulai 17 Januari hingga 5 Februari 2024. Tahap pengolahan dan evaluasi mulai 9-20 Februari 2024 dan akan dirilis pada bulan Maret.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, sebelumnya dari OJK sudah tiga kali melakukan survei secara independen.

"Dan ini yang pertama kalinya bekerja sama dengan BPS. Jadi kita ukur literasi dan inklusi masyarakat tentang keuangan. Untuk literasi ada lima hal, pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Sedangkan inklusi, apa saja yang sudah diakses oleh masyarakat," katanya. (Awh)-f

HARUS DIKELOLA SECARA PROFESIONAL

Zakat Dukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat

SLEMAN (KR) - Dalam upaya membangun ekonomi masyarakat, zakat merupakan salah satu instrumen yang berpotensi untuk pengembangan dan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat. Potensi ini harus dikelola secara profesional agar zakat benar-benar dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs Beny Suharsono MSi dalam sambutan yang dibacakan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Djarot Margiantoro, pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) se-DIY di RM Pringsewu Jalan Magelang Sendangdi Mlati Sleman, Selasa (30/1). Acara dihadiri Bupati Sleman Kustini, Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag DIY Nurhuda, para Kabag Kesra Kabupaten/Kota se-DIY, serta pimpinan Baznas DIY dan Baznas Kabupaten se-DIY.

Rakorda ini sekaligus sebagai puncak rangkaian acara Milad ke-23 Baznas se-DIY. Pada kesempatan ini dilakukan pemotongan



Bupati Sleman Kustini memotong tumpeng Milad ke-23 Baznas dan diserahkan kepada Ketua Baznas DIY Puji Astuti.

tumpeng oleh Bupati Sleman. Juga dilakukan penyaluran program-program strategis Baznas se-DIY, antara lain bantuan biaya pendidikan, operasional Madrasah Alquran di Lapas Narkotika DIY, bedah rumah, dan lainnya. Ketua Baznas DIY Dra Hj Puji Astuti MSi menjelaskan, Milad ke-23 Baznas pada 17 Januari. Sedangkan rangkaian kegiatan dilakukan sejak akhir Desember sampai Januari. Antara lain khitanan massal, screening kesehatan, dan berbagai penyaluran. "Masing-masing Baznas se-DIY melakukan khataman Alquran, sehingga tadi dibacakan doa khotmil Quran. Lebih jauh Sekda DIY

mengatakan, zakat tidak hanya berdimensi vertikal, tetapi juga horizontal yang menyangkut hubungan ibadah terhadap sesama manusia. Dimensi horizontal ini memiliki dampak luar biasa. Secara sosial zakat dapat membangun masyarakat madani atas dasar silaturahmi dan secara ekonomi zakat adalah sumber kas Negara dan penunjuk arah kehidupan ekonomi berdasarkan Alquran.

"Untuk itu saya mengapresiasi upaya Baznas sebagai badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah yang telah berkomitmen dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak. Dan sedekah atau ZIS," tegasnya. (Fie)-f



Menyeimbangkan Pembangunan Fisik dan Nonfisik

SLEMAN (KR) - Pembangunan fisik dan nonfisik di Kabupaten Sleman perlu diseimbangkan. Hal itu dikarenakan masyarakat masih banyak yang beranggapan, bahwa pembangunan harus berupa fisik. Padahal pembangunan nonfisik seperti pemberdayaan masyarakat cukup penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Wakil Ketua DPRD Sleman Arif Kurniawan SAG MH mengatakan, masing-masing anggota saat ini memiliki dana pokok pikiran (Pokir) dewan. Dana pokir itu untuk merealisasikan aspirasi dari masyarakat dalam hal meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sleman.

"Jadi dewan itu menyerap aspirasi dari masyarakat. Kemudian aspirasi itu direalisasikan menggunakan program pokir melalui kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Arif, Selasa (30/1).

Dikatakan, dana pokir itu dapat digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jem-

Arif Kurniawan SAG MH Wakil Ketua DPRD Sleman dari Fraksi PAN



Arif Kurniawan SAG MH.

batan, talut, penerangan jalan dan lainnya. Selain itu juga dapat untuk pembangunan nonfisik berupa pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan budi daya ikan, pelatihan bagi KWT, catering dan lainnya.

"Selama ini sudah banyak program pokir saya yang diterima masyarakat. Baik itu pembangunan fisik dan nonfisik," terang warga Botokan Sendangrejo Minggir ini.

Menurut Arif, selama ini orientasi masyarakat

dalam pembangunan itu ke arah fisik. Sedangkan program pemberdayaan tidak seimbang dengan pembangunan fisik. Akibatnya anggaran pembangunan fisik di padukuhan cukup banyak.

"Belum lagi satu padukuhan itu mendapat program pokir dari beberapa dewan dan mayoritas berupa pembangunan fisik. Akibatnya pembangunan fisik dengan nonfisik padukuhan tidak seimbang," ujarnya.

Di samping seimbang, pembangunan fisik dan nonfisik perlu diratakan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah eksekutif khususnya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat memfilter agar tidak terjadi penumpukan.

"Misalnya ada aplikasi, ketika padukuhan sudah menerima dua atau tiga program pembangunan fisik dari pokir sudah tidak bisa menambah lagi. Tapi bisa mengaksess program nonfisik. Sehingga antara pembangunan fisik dan nonfisik bisa merata," tuturnya. (Sni)-f